

Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Pemenuhan Hak Gizi Anak: Analisis Sebaran SPPG dan Jumlah Peserta Didik di Indonesia

Maria Br Napitupulu

Universitas Mandiri Bina Prestasi, Indonesia

Corresponding Author: mariabrnapiitupulu@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia's rapid expansion of the Free Nutritious Meal Program requires a distribution model that places children's nutritional rights at the center of operational planning. This study examines program equity by comparing operational Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG) with the number of basic-education students across 38 provinces. A quantitative descriptive design was applied to secondary data from the National Nutrition Agency and the Ministry of Primary and Secondary Education. The analysis used provincial student shares, proportional SPPG requirements, an indicative student-to-SPPG ratio, and a service-burden index. The dataset records 41,442,225 students and 30,230 operational units, producing a national ratio of approximately 1,371 students per SPPG. West Java, East Java, and Central Java contain 43.59% of the student population. A focused comparison found a lower burden index in East Java, while North Sumatra and Banten exceeded the national benchmark. The findings show that equitable fulfillment of children's nutritional rights requires an allocation formula combining student numbers, nutritional vulnerability, poverty, geography, distribution distance, and unit capacity. This study provides a transparent baseline for territorial evaluation and service-priority verification.

Keywords: Children's Nutrition; Free Meals; SPPG; Equity

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
02.02.2026	01.04.2026	01.05.2026	30.07.2026

ABSTRACT

Perluasan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia membutuhkan model distribusi yang menempatkan hak gizi anak sebagai dasar perencanaan operasional. Penelitian ini menganalisis pemerataan program melalui perbandingan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) operasional dan jumlah peserta didik pendidikan dasar pada 38 provinsi. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari Badan Gizi Nasional serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Analisis mencakup pangsa peserta didik, kebutuhan SPPG proporsional, rasio indikatif peserta didik per SPPG, dan indeks beban layanan. Data mencatat 41.442.225 peserta didik dan 30.230 unit operasional, sehingga rasio nasional mencapai sekitar 1.371 peserta didik per SPPG. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menampung 43,59% peserta didik nasional. Perbandingan terpilah menemukan indeks beban yang lebih rendah di Jawa Timur, sedangkan Sumatera Utara dan Banten melampaui tolok ukur nasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa pemenuhan hak gizi anak secara adil membutuhkan formula alokasi yang menggabungkan jumlah peserta didik, kerentanan gizi, kemiskinan, kondisi geografis, jarak distribusi, dan kapasitas unit. Penelitian ini menyediakan dasar transparan untuk evaluasi wilayah dan verifikasi prioritas layanan.

Keywords: Hak Gizi Anak; MBG; Sebaran SPPG; Pemerataan

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
02.01.2026	01.04.2026	01.06.2026	15.07.2026

PENDAHULUAN

Pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari hak dasar yang menuntut tindakan nyata negara, bukan sekadar pengakuan normatif. Makanan sekolah yang dirancang dengan standar gizi yang jelas dapat memperbaiki kualitas asupan dan mengurangi kesenjangan antarkelompok sosial. Bukti empiris menunjukkan bahwa standar makanan sekolah berhubungan dengan perbaikan mutu diet sekaligus penyempitan disparitas berdasarkan pendapatan dan latar sosial (Smith et al., 2024). Dalam kerangka pembangunan manusia, intervensi pangan di sekolah juga berkaitan dengan kehadiran, konsentrasi, dan kesiapan belajar karena kebutuhan biologis anak berhubungan langsung dengan proses pendidikan (Barnabas et al., 2024).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempatkan sekolah dan satuan layanan gizi sebagai simpul kebijakan publik yang menghubungkan hak anak, layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan wilayah. Pengalaman

internasional memperlihatkan bahwa cakupan universal dapat mengurangi hambatan administrasi dan stigma, tetapi perlu didukung ketepatan sasaran operasional, mutu menu, serta kesinambungan pembiayaan. Penghentian cakupan makan sekolah universal terbukti menurunkan partisipasi dan meningkatkan kerawanan pangan anak (Toossi, 2024). Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan program tidak cukup berhenti pada jumlah porsi yang dibagikan; pemerataan akses dan kualitas layanan harus ditempatkan sebagai ukuran utama.

Di Indonesia, arsitektur kelembagaan program diperkuat melalui pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Badan tersebut berada di bawah Presiden dan menjalankan tugas pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Tata kelola MBG kemudian dirinci melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mencakup penyelenggaraan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang atau jasa (Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Kerangka tersebut menegaskan bahwa pemerataan bukan isu tambahan, melainkan bagian dari akuntabilitas negara dalam menjamin hak gizi anak.

Pelaksanaan MBG bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit produksi dan distribusi makanan. Pada 6 Juni 2026, Badan Gizi Nasional mencatat 30.230 SPPG operasional di Indonesia (Badan Gizi Nasional, 2026). Pada sisi penerima layanan pendidikan dasar, data Kemendikdasmen per 25 Juli 2026 mencatat 41.442.225 peserta didik yang tersebar di 38 provinsi (Kemendikdasmen, 2026). Dua angka tersebut menunjukkan skala layanan yang sangat besar sekaligus menghadirkan pertanyaan tentang kesesuaian distribusi unit dengan konsentrasi peserta didik di setiap wilayah.

Kajian mengenai MBG berkembang pesat sejak program dilaksanakan. Sejumlah penelitian membahas pembelajaran dari negara lain, tantangan implementasi, koordinasi kelembagaan, dan hubungan program dengan pembangunan sumber daya manusia (Rassanjani & Rahmi, 2025; Suprpto et al., 2025; Nurmansyah & Fitriani, 2025). Penelitian lain menyoroti pengalaman sekolah, respons guru, kesehatan peserta didik, serta pengaruh program terhadap kesiapan belajar (Kasi et al., 2025; Hasibuan et al., 2025; Babo et al., 2026). Meskipun demikian, pembahasan yang menghubungkan jumlah peserta didik, sebaran SPPG,

beban layanan indikatif, dan prinsip pemerataan hak gizi antarprovinsi masih terbatas.

Kesenjangan penelitian tersebut penting karena distribusi unit yang tampak besar secara nasional belum tentu menghasilkan akses yang setara di tingkat wilayah. Provinsi dengan jumlah peserta didik tinggi membutuhkan lebih banyak unit, sedangkan provinsi kepulauan, pegunungan, dan berpenduduk tersebar membutuhkan desain layanan yang mempertimbangkan jarak dan biaya distribusi. Kesetaraan formal berupa pembagian unit yang sama akan menghasilkan beban layanan berbeda ketika struktur penduduk dan kondisi geografis tidak sama. Pemerataan substantif menuntut alokasi berdasarkan kebutuhan, kerentanan, serta hambatan wilayah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemerataan MBG melalui tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konsentrasi peserta didik pendidikan dasar di 38 provinsi? Kedua, bagaimana kebutuhan SPPG secara proporsional apabila jumlah peserta didik digunakan sebagai dasar awal alokasi? Ketiga, bagaimana perbandingan beban layanan indikatif pada provinsi yang memiliki data SPPG terpilah? Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan rasio nasional, kebutuhan proporsional, dan indeks beban layanan sebagai alat baca pemerataan yang sederhana, transparan, dan mudah diperbarui.

BAHAN DAN METODE

Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan pendekatan hak anak. Unit analisis terdiri atas 38 provinsi. Data jumlah peserta didik berasal dari laman resmi Kemendikdasmen untuk jenjang pendidikan dasar, sedangkan jumlah SPPG berasal dari daftar operasional Badan Gizi Nasional. Data peserta didik merupakan potret 25 Juli 2026, sedangkan data SPPG nasional merupakan potret 6 Juni 2026. Perbedaan tanggal dicatat sebagai batas analisis karena kedua basis data bergerak secara dinamis. Variabel pertama adalah jumlah peserta didik tiap provinsi. Variabel kedua adalah pangsa peserta didik, dihitung dengan membagi jumlah peserta didik provinsi terhadap total nasional lalu dikalikan seratus. Variabel ketiga adalah kebutuhan SPPG proporsional, yaitu pangsa peserta didik provinsi dikalikan 30.230 unit. Angka tersebut bukan target resmi pemerintah, melainkan tolok ukur

analitis untuk melihat distribusi apabila satu-satunya dasar alokasi adalah jumlah peserta didik.

Variabel keempat adalah rasio peserta didik per SPPG, dihitung dengan membagi jumlah peserta didik dengan jumlah SPPG. Berdasarkan total nasional, rasio indikatifnya adalah 41.442.225 dibagi 30.230 atau sekitar 1.371 peserta didik per unit. Variabel kelima adalah indeks beban layanan, yaitu rasio provinsi dibagi rasio nasional lalu dikalikan seratus. Nilai 100 menandakan beban setara tolok ukur nasional; nilai di atas 100 menunjukkan beban lebih tinggi; nilai di bawah 100 menunjukkan beban lebih rendah. Perbandingan aktual dibatasi pada Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten karena laman operasional BGN menampilkan hasil pencarian provinsi secara terpisah pada potret data yang berdekatan. Jumlah SPPG yang digunakan adalah 4.340 unit di Jawa Timur, 1.594 unit di Sumatera Utara, dan 1.416 unit di Banten. Rasio ini disebut indikatif karena SPPG melayani kelompok sasaran lain selain peserta didik pendidikan dasar, termasuk peserta didik jenjang lain serta kelompok kesehatan tertentu.

Analisis dilakukan melalui tabulasi, pemeringkatan, perhitungan persentase, rasio, selisih terhadap kebutuhan proporsional, dan interpretasi berbasis prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta non-diskriminasi. Kerangka analisis tidak menilai mutu menu, keamanan pangan, atau dampak biologis secara langsung. Hasil kuantitatif dibaca bersama temuan penelitian mutakhir mengenai standar gizi, tata kelola, koordinasi, dan ketahanan layanan makanan sekolah (Calle & Fondell, 2024; Knapp et al., 2024; Pramesthi et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Peserta Didik dan Kebutuhan SPPG Proporsional

Data menunjukkan total 41.442.225 peserta didik pendidikan dasar di 38 provinsi. Distribusinya terkonsentrasi pada Pulau Jawa. Jawa Barat menampung 7.760.868 peserta didik atau 18,73% dari total nasional; Jawa Timur 5.353.311 peserta didik atau 12,92%; dan Jawa Tengah 4.950.848 peserta didik atau 11,95%. Ketiga provinsi tersebut mencakup 43,59% peserta didik pendidikan dasar Indonesia. Konsentrasi ini menuntut kapasitas produksi dan distribusi yang besar, tetapi tidak menghapus

kebutuhan khusus wilayah dengan populasi lebih kecil dan hambatan geografis lebih berat.

Tabel 1. Distribusi peserta didik pendidikan dasar dan kebutuhan SPPG proporsional

No.	Provinsi	Peserta Didik	Pangsa (%)	SPPG Proporsional
1	DKI Jakarta	1.268.113	3,06	925
2	Jawa Barat	7.760.868	18,73	5.661
3	Jawa Tengah	4.950.848	11,95	3.611
4	DI Yogyakarta	451.126	1,09	329
5	Jawa Timur	5.353.311	12,92	3.905
6	Aceh	940.367	2,27	686
7	Sumatera Utara	2.494.266	6,02	1.819
8	Sumatera Barat	902.199	2,18	658
9	Riau	1.215.927	2,93	887
10	Jambi	593.634	1,43	433
11	Sumatera Selatan	1.416.666	3,42	1.033
12	Lampung	1.368.501	3,30	998
13	Kalimantan Barat	890.514	2,15	650
14	Kalimantan Tengah	451.018	1,09	329
15	Kalimantan Selatan	617.968	1,49	451
16	Kalimantan Timur	659.302	1,59	481
17	Sulawesi Utara	336.856	0,81	246
18	Sulawesi Tengah	487.851	1,18	356
19	Sulawesi Selatan	1.399.273	3,38	1.021
20	Sulawesi Tenggara	465.318	1,12	339
21	Maluku	322.767	0,78	235
22	Bali	604.624	1,46	441
23	Nusa Tenggara Barat	931.956	2,25	680
24	Nusa Tenggara Timur	977.082	2,36	713
25	Papua	176.421	0,43	129

No.	Provinsi	Peserta Didik	Pangsa (%)	SPPG Proporsional
26	Bengkulu	320.609	0,77	234
27	Maluku Utara	225.738	0,54	165
28	Banten	2.046.942	4,94	1.493
29	Kepulauan Bangka Belitung	239.610	0,58	175
30	Gorontalo	176.030	0,42	128
31	Kepulauan Riau	355.686	0,86	259
32	Papua Barat	103.330	0,25	75
33	Sulawesi Barat	229.643	0,55	168
34	Kalimantan Utara	122.793	0,30	90
35	Papua Tengah	184.684	0,45	135
36	Papua Selatan	127.367	0,31	93
37	Papua Pegunungan	179.277	0,43	131
38	Papua Barat Daya	93.740	0,23	68

Sumber: Diolah dari Kemendikdasmen (2026) dan Badan Gizi Nasional (2026).

Tolok ukur proporsional menghasilkan kebutuhan sekitar 5.661 SPPG untuk Jawa Barat, 3.905 untuk Jawa Timur, dan 3.611 untuk Jawa Tengah. Sumatera Utara berada pada urutan berikutnya dengan kebutuhan sekitar 1.819 unit, diikuti Banten sekitar 1.493 unit. Nilai tersebut berfungsi sebagai baseline demografis. Baseline ini penting untuk mendeteksi wilayah yang berpotensi menanggung beban tinggi sebelum faktor kerentanan gizi dan geografis dimasukkan ke dalam formula.

Pada kelompok provinsi berpenduduk lebih kecil, kebutuhan proporsional berada di bawah 200 unit pada beberapa wilayah, antara lain Papua Barat Daya, Papua Barat, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Gorontalo, Papua, dan Papua Pegunungan. Angka kecil tidak boleh dibaca sebagai kebutuhan layanan yang ringan. Penyebaran sekolah, akses jalan, pulau terpisah, pegunungan, ketersediaan pemasok, dan waktu tempuh dapat meningkatkan biaya serta kompleksitas pelayanan per anak.

Perbandingan Beban Layanan pada Tiga Provinsi

Perbandingan terpilah memperlihatkan variasi yang nyata. Jawa Timur memiliki 4.340 SPPG untuk 5.353.311 peserta didik pendidikan dasar, sehingga rasionya sekitar 1.233 peserta didik per unit dan indeks bebannya 89,98. Sumatera Utara memiliki 1.594 SPPG untuk 2.494.266 peserta didik, dengan rasio sekitar 1.565 dan indeks 114,14. Banten memiliki 1.416 SPPG untuk 2.046.942 peserta didik, dengan rasio sekitar 1.446 dan indeks 105,45.

Tabel 2. Perbandingan beban layanan indikatif

Provinsi	Peserta Didik	SPPG Aktual	Rasio PD/SPPG	Indeks Beban	SPPG Proporsional	Selisih Aktual
Jawa Timur	5.353.311	4.340	1.233	89,98	3.905	+435
Sumatera Utara	2.494.266	1.594	1.565	114,14	1.819	-225
Banten	2.046.942	1.416	1.446	105,45	1.493	-77

Catatan: Rasio tidak menggambarkan kapasitas riil karena satu SPPG melayani lebih dari satu kelompok sasaran. Sumber: Diolah dari data resmi tahun 2026.

Jawa Timur memiliki 435 unit lebih banyak dibanding baseline proporsional berbasis peserta didik pendidikan dasar. Sumatera Utara berada sekitar 225 unit di bawah baseline, sedangkan Banten sekitar 77 unit di bawah baseline. Selisih tersebut tidak dapat langsung dinilai sebagai kelebihan atau kekurangan mutlak karena cakupan penerima SPPG lebih luas. Namun, pola tersebut memberi sinyal awal tentang wilayah yang perlu diperiksa lebih dalam melalui data penerima aktual, kapasitas produksi harian, jarak sekolah, dan status operasional unit.

Hasil juga menunjukkan bahwa angka nasional dapat menutupi variasi antardaerah. Rasio nasional 1.371 peserta didik per SPPG tampak moderat, tetapi provinsi dengan indeks di atas 100 menghadapi beban demografis yang lebih tinggi. Ketika beban tinggi beririsan dengan kemiskinan, kerawanan gizi, atau hambatan distribusi, risiko ketidaksetaraan bertambah. Sebaliknya, indeks rendah perlu dibaca bersama kapasitas harian dan luas wilayah agar penilaian tidak keliru.

Pemerataan sebagai Pemenuhan Hak Gizi Anak

Hak gizi anak menuntut akses yang setara secara substantif. Kesetaraan substantif tidak berarti setiap provinsi menerima jumlah SPPG yang sama, melainkan setiap anak memperoleh layanan dengan standar mutu, frekuensi, dan keamanan yang setara meskipun kondisi wilayah berbeda. Karena jumlah peserta didik terkonsentrasi di beberapa provinsi, penggunaan angka unit secara mentah akan menyesatkan. Distribusi harus dinilai terhadap populasi sasaran dan beban layanan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan bukti bahwa kebijakan makan sekolah yang universal dapat memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan mengurangi hambatan akses (Toossi, 2024). Namun, universalitas pada tingkat norma harus diterjemahkan menjadi kapasitas yang cukup di tingkat layanan. Ketika unit terlalu sedikit dibanding populasi sasaran, terjadi tekanan pada produksi, pengantaran, jadwal makan, pengawasan mutu, dan pencatatan penerima. Tekanan tersebut dapat mengurangi kualitas hak yang diterima anak.

Standar gizi juga harus berjalan bersama pemerataan geografis. Penelitian Smith, Lin, dan Guthrie menunjukkan bahwa standar makanan sekolah dapat mengurangi disparitas kualitas diet (Smith et al., 2024). Artinya, penambahan unit tanpa standar menu dan pengawasan tidak otomatis menghasilkan keadilan gizi. Sebaliknya, standar yang baik tanpa jangkauan wilayah yang memadai juga meninggalkan kelompok anak di luar layanan. Pemerataan membutuhkan integrasi antara jumlah unit, kapasitas, mutu makanan, dan kontinuitas.

Pengalaman program ProGAS di Indonesia memperlihatkan bahwa makanan sekolah, pendidikan gizi, dan lingkungan belajar perlu dibaca sebagai satu rangkaian (Pramesthi et al., 2025). MBG dapat menggunakan pembelajaran tersebut dengan menempatkan indikator gizi dan pendidikan dalam evaluasi yang sama. Jumlah SPPG dan porsi merupakan indikator keluaran, sedangkan status gizi, kehadiran, konsentrasi, penerimaan menu, serta keamanan pangan merupakan indikator hasil. Pemerataan sejati tercapai ketika perbedaan hasil antardaerah terus mengecil.

Keterbatasan Alokasi Berbasis Jumlah Penduduk Siswa

Baseline proporsional berbasis peserta didik berguna karena mudah dihitung, transparan, dan dapat diperbarui. Walau demikian, formula

tunggal tersebut belum menangkap keragaman Indonesia. Dua provinsi dengan jumlah peserta didik sama dapat membutuhkan jumlah unit berbeda ketika kepadatan sekolah, jarak antarkecamatan, akses transportasi, kondisi kepulauan, harga bahan pangan, dan ketersediaan tenaga gizi tidak sama. Wilayah padat dapat memperoleh efisiensi skala karena satu unit menjangkau banyak sekolah dalam radius pendek. Di wilayah terpencar, satu unit mungkin melayani lebih sedikit anak tetapi menanggung waktu tempuh lebih panjang. Penelitian mengenai layanan makanan sekolah saat krisis menunjukkan bahwa koordinasi, pengadaan, tenaga kerja, komunikasi, dan kemitraan lokal menentukan daya tahan layanan (Knapp et al., 2024). Dengan demikian, formula pemerataan perlu memasukkan biaya geografis, bukan hanya volume penerima.

Pangsa peserta didik juga belum menggambarkan tingkat kebutuhan gizi. Provinsi dengan jumlah anak lebih kecil dapat memiliki prevalensi masalah gizi yang lebih tinggi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menghendaki bobot tambahan bagi wilayah dengan stunting, wasting, anemia, kemiskinan anak, dan ketahanan pangan rumah tangga yang buruk. Pendekatan ini menggeser alokasi dari kesamaan administratif menuju keadilan berbasis kebutuhan. Kajian implementasi MBG menekankan pentingnya pemetaan sasaran, kesiapan organisasi, koordinasi, dan sistem pemantauan sejak tahap awal (Nurmansyah & Fitriani, 2025; Suprpto et al., 2025). Karena itu, baseline peserta didik sebaiknya dipakai sebagai pintu masuk, lalu disesuaikan dengan indikator kerentanan dan hambatan pelayanan. Formula berlapis akan mengurangi risiko konsentrasi unit hanya pada wilayah yang mudah dibangun, tetapi tidak selalu memiliki beban kebutuhan tertinggi.

Model Indeks Pemerataan SPPG

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan indeks pemerataan SPPG dapat menggunakan lima komponen. Pertama, bobot populasi peserta didik. Kedua, bobot kerentanan gizi dan kemiskinan anak. Ketiga, bobot geografis yang mencakup luas wilayah, pulau, pegunungan, dan waktu tempuh. Keempat, bobot kapasitas layanan yang mencakup produksi harian, tenaga, sanitasi, dan transportasi. Kelima, bobot mutu hasil berupa keamanan pangan, kepatuhan menu, penerimaan anak, dan kontinuitas layanan.

Komponen tersebut perlu ditampilkan melalui dashboard publik. Setiap SPPG dapat memiliki profil yang mencakup lokasi, sekolah yang dilayani, jumlah penerima, kapasitas harian, waktu pengiriman, status sertifikasi, hasil inspeksi, dan keluhan. Transparansi membuat pemerataan dapat diuji oleh pemerintah daerah, sekolah, keluarga, akademisi, dan masyarakat. Tata kelola digital juga membantu mendeteksi unit yang tercatat operasional tetapi belum mencapai kapasitas normal.

Prinsip tata kelola yang baik menuntut data yang konsisten, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan tindak lanjut berbasis bukti. Studi daerah memperlihatkan bahwa komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan kolaborasi memengaruhi pelaksanaan MBG (Pratama et al., 2026; Babo et al., 2026). Karena itu, indeks pemerataan harus menjadi instrumen pengambilan keputusan, bukan sekadar laporan statistik. Wilayah dengan indeks beban tinggi perlu memperoleh prioritas ekspansi, pendampingan, dan pengawasan.

Pemetaan juga harus memperhatikan suara sekolah dan penerima. Persepsi guru menunjukkan adanya manfaat sekaligus tantangan operasional pada pelaksanaan MBG (Kasi et al., 2025). Umpan balik sekolah dapat menjelaskan penyebab di balik angka, seperti keterlambatan pengiriman, menu yang tidak diterima anak, porsi yang tidak sesuai usia, atau gangguan jadwal belajar. Data administratif dan pengalaman pengguna perlu disatukan untuk menghasilkan keputusan yang tajam.

Implikasi bagi Kebijakan Nasional dan Daerah

Pada tingkat nasional, BGN perlu menetapkan standar minimum cakupan yang menghubungkan jumlah unit, kapasitas produksi, dan jumlah penerima. Target pembentukan SPPG sebaiknya diturunkan menjadi kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan formula terbuka. Penetapan target juga perlu disertai rentang toleransi agar perbedaan kondisi lokal tetap tertampung.

Pada tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memutakhirkan peta sekolah, jalan, pemasok, fasilitas kesehatan, serta wilayah rawan pangan. Data tersebut menjadi dasar penentuan lokasi unit baru dan rute distribusi. Kebijakan tidak harus selalu berbentuk

dapur besar; pada wilayah sulit, desain layanan dapat menggunakan unit lebih kecil dengan standar yang sama dan pengawasan lebih dekat.

Kebijakan MBG juga perlu menjaga hubungan dengan sistem pendidikan. Program yang baik tidak mengganggu waktu belajar, tidak menambah beban administrasi guru secara berlebihan, dan mendukung pendidikan gizi. Temuan tentang hubungan makanan bergizi dengan kesiapan belajar dan capaian sekolah menguatkan pentingnya integrasi tersebut (Hasibuan et al., 2025; Barnabas et al., 2024). Evaluasi perlu memisahkan pengaruh jumlah makanan, kualitas menu, dan lingkungan pelaksanaan agar perbaikan kebijakan lebih tepat.

Dalam jangka panjang, pemerataan SPPG harus dinilai melalui penurunan kesenjangan hasil antardaerah. Indikatornya dapat berupa perbedaan status gizi, ketidakhadiran, konsentrasi belajar, keamanan pangan, dan kontinuitas layanan. Kajian kebijakan nasional menegaskan bahwa manfaat pembangunan sumber daya manusia bergantung pada mutu implementasi, bukan hanya besarnya program (Yuliani et al., 2026; Pora et al., 2025). Oleh sebab itu, ekspansi kuantitatif harus berjalan bersama kontrol kualitas dan evaluasi hasil.

Temuan utama penelitian ini tidak menyatakan bahwa provinsi dengan selisih negatif pasti kekurangan SPPG. Kesimpulan tersebut membutuhkan data penerima aktual setiap unit, kapasitas harian, dan kelompok sasaran lain. Namun, indeks beban dapat menjadi sistem peringatan awal. Sumatera Utara dan Banten, yang berada di atas tolok ukur nasional, layak menjadi prioritas verifikasi. Jawa Timur, yang berada di bawah tolok ukur, tetap perlu dinilai dari distribusi intraprovinci karena kelebihan agregat dapat berdampingan dengan kekurangan pada kabupaten tertentu.

SIMPULAN

Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis harus dinilai berdasarkan kebutuhan anak, bukan semata-mata jumlah SPPG. Analisis terhadap 41.442.225 peserta didik pendidikan dasar dan 30.230 SPPG menghasilkan rasio nasional indikatif sekitar 1.371 peserta didik per unit. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menampung 43,59% peserta didik sehingga membutuhkan kapasitas layanan yang sangat besar. Perbandingan terpilah menunjukkan indeks beban Jawa Timur sebesar

89,98, Sumatera Utara 114,14, dan Banten 105,45. Hasil tersebut menegaskan bahwa distribusi unit perlu dikaitkan dengan populasi sasaran, kapasitas, kerentanan gizi, kemiskinan, kondisi geografis, dan mutu hasil. Baseline proporsional dapat menjadi alat awal untuk menetapkan prioritas ekspansi serta memeriksa ketimpangan antarwilayah secara terbuka. Penelitian ini terbatas pada data sekunder dengan tanggal potret yang tidak sepenuhnya sama serta belum menggunakan kapasitas produksi, penerima aktual, jarak distribusi, status gizi, dan data kabupaten/kota. Rasio peserta didik per SPPG juga tidak menggambarkan beban riil karena satu unit melayani kelompok sasaran yang lebih luas. Penelitian lanjutan perlu membangun indeks komposit hingga tingkat kabupaten/kota, menguji hubungan sebaran SPPG dengan hasil gizi dan pendidikan, serta memasukkan data waktu tempuh dan keamanan pangan. Pemerintah perlu menerbitkan data terpilah yang dapat diunduh agar evaluasi pemerataan berlangsung berkala dan hak gizi anak dapat diawasi melalui ukuran yang objektif

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas selesainya artikel ilmiah program PKM ini. Terimakasih juga kepada para pihak yang berkontribusi pada pengabdian ini.

REFERENSI

- Babo, D. H. P., Sidi, K. R., & Imtiyaz, H. (2026). Implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) Program: A health policy perspective from Jakarta. *Jurnal Cakrawala Promkes*, 8(1). <https://doi.org/10.12928/jcp.v8i1.15522>
- Badan Gizi Nasional. (2026). Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah operasional. <https://www.bgn.go.id/operasional-sppg/>
- Barnabas, B., Bavorova, M., Imami, D., & Zhllima, E. (2024). Access to food vs. education—Feeding the stomach is important for feeding the mind. *Child Indicators Research*, 17, 2739–2767. <https://doi.org/10.1007/s12187-024-10176-9>

- Calle, M., & Fondell, E. (2024). School-based eating interventions—Are students eating healthily? *Nutrients*, 16(18), 3081. <https://doi.org/10.3390/nu16183081>
- Hasibuan, A. T., Dalimunte, T., & Sahlan. (2025). Dari piring ke prestasi: Dampak makanan bergizi gratis di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 16(2), 311–325. <https://doi.org/10.21009/jpd.v16i2.63312>
- Kasi, Y. F., Ga'a, M. E., Jajuri, T. B., & Bai, D. V. (2025). Perceptions of teachers on the Free Nutritious Meal Program implementation in Indonesia: Benefits and challenges. *Pedagonal: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(2). <https://doi.org/10.55215/pedagonal.v9i2.54>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Residu peserta didik per provinsi: Jenjang pendidikan dasar. <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/residu/pesertadidik/wilayah?jenjang=Dikdas>
- Knapp, M. B., Creveling, K., Washington, D., Ennin, N., & Numa, T. (2024). New Orleans school meal programs during the COVID-19 pandemic: Challenges and innovations identified through qualitative interviews. *BMC Public Health*, 24, 1614. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19107-3>
- Nurmansyah, M. I., & Fitriani, A. (2025). Applying an implementation research lens to Indonesia's Free Nutritious Meal Program. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 13(2), 133–141. <https://doi.org/10.20473/jaki.v13i2.2025.133-141>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Pora, S., Muksin, D., & Rahmat, A. F. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis pada pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi dan tantangan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 635–694. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4352>
- Pramesthi, I. L., Wiradnyani, L. A. A., Anggraini, R., Februhartanty, J., Widaryat, W., Waluyo, B. H., Wahyunto, A. T., Mansyur, M., & Fahmida, U. (2025). Evaluating the impact of Indonesia's National School Feeding Program (ProGAS) on children's nutrition and

- learning environment: A mixed-methods approach. *Nutrients*, 17(22), 3575. <https://doi.org/10.3390/nu17223575>
- Pratama, N., Harianto, Wiyaka, A., & Ridwan, A. (2026). Implementation of the Free Nutritional Meal Program policy from a good governance perspective in Madiun City in 2025. *International Journal Administration, Business & Organization*. <https://doi.org/10.61242/ijabo.26.731>
- Rassanjani, S., & Rahmi, I. (2025). Free school meals policy: Lessons learned from around the world for Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 24(1), 1–28. <https://doi.org/10.14710/jis.24.1.2025.1-28>
- Smith, T. A., Lin, B.-H., & Guthrie, J. (2024). School meal nutrition standards reduce disparities across income and race/ethnicity. *American Journal of Preventive Medicine*, 67(2), 249–257. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2024.03.012>
- Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A policy implementation review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 297–312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>
- Toossi, S. (2024). The effect of universal free school meals on children's food hardship. *Food Policy*, 124, 102606. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2024.102606>
- Yuliani, F., Juniarsih, W., Prayitno, H. J., & Indri. (2026). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Analisis implementasi, dampak terhadap sumber daya manusia, dan implikasinya pada kebijakan sistem pendidikan nasional. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.46281>